

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIK**

#### **A. Pemberdayaan Masyarakat**

##### **1. Pengertian**

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *“Empowerment”*, yang bias diartikan sebagai pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.<sup>19</sup> Pemberdayaan masyarakat adalah erangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat eningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keterberdayaan kelompok lemah yang ada dalam masyarakat, termasuk individu –individu yang mengalami kemiskinan.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat

---

<sup>19</sup> Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 82

fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>20</sup>

Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan dalam mencapai penguat diri untuk meraih keinginan yang dicapai. Pemberdayaan akan melahirkan suatu kemandirian masyarakat, baik kemandirian berfikir, sikap, maupun tindakan yang pada akhirnya mampu memunculkan sebuah kehidupan yang lebih baik.

Definisi lain tentang masyarakat menurut Salim Suradjo adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang memiliki akses ke sumber daya manusia didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan peri kehidupan mereka.

Pada prinsipnya masyarakat mengkaji tentang utama pembangunan mereka lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Aktivitas ini kemudian menjadi basis program local regional. Bahkan nasional, target utama pendekatan ini adalah kelompok yang termajinalkan dalam masyarakat. Termasuk wanita, namun demikian hal ini mematkan partisipasi dari kelompok lain.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus. Proses partisipasi dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok format maupun non format. Untuk berbagi pengetahuan dan

---

<sup>20</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama , 2005), hal. 60

pengalaman serta usaha mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses. Ketimbang sebuah pendekatan cetak biru.<sup>21</sup> Adapun menurut Bagyon Suyanto pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.<sup>22</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

- a. *Bertumpu pada pembangunan manusia*. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya
- b. *Otonomi*. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola
- c. *Desentralisasi*. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya
- d. *Berorientasi pada Masyarakat Miskin*. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
- e. *Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat*. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan
- f. *Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan

---

<sup>21</sup> Moh Ali Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 136

<sup>22</sup> Moh Ali Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat.....*, hal. 165

dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut

- g. *Demokratis*. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin
- h. *Transparansi dan Akuntabel*. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif
- i. *Prioritas*. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas
- j. *Kolaborasi*. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan
- k. *Keberlanjutan*. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan<sup>23</sup>

Berdasarkan kajian konsep dasar pengembangan masyarakat yang dilanjutkan dengan merekonstruksi konsep dakwah sebagai bagian dari upaya membangun paradigma baru model dakwah maka dakwah pengembangan masyarakat harus mengikuti beberapa prinsip dasar yaitu:

*Pertama*, orientasi pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat luas. Dakwah tidak dilaksanakan sekadar merumuskan keinginan sebagian masyarakat saja, tetapi direncanakan sebagai usaha membenahi kehidupan sosial bersama masyarakat agar penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan tidak lagi hidup ditengah-tengah mereka. Skala makro yang menjadi sasaran dakwah bukan berarti meninggalkan skala mikro kepentingan individu anggota masyarakat..

*Kedua*, dakwah pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah upaya melakukan *social engineering* (rekayasa sosial) untuk mendapatkan suatu perubahan tatana kehidupan sosial yang lebih baik.

Disamping kedua prinsip dasar tersebut, ada beberapa prinsip yang lain yang harus terpenuhi dalam dakwah pengembangan masyarakat yaitu:

a. Prinsip Kebutuhan,

---

<sup>23</sup><http://nmc.ppk.or.id/Modul%20Pratugas%20-%20Slicing%202009%20%20Apr%2009/-PB.2.%20kebijakan/BB.Untuk%20Peserta/Final%20Draft%20Buku%20Saku%20KPMD/i-Cover%-20Bridging.doc>. Tgl, 14 Juni 2010 jam 03.11 WIB

Artinya, program dakwah harus didasarkan atas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik materiil dan non materiil.

b. Prinsip Partisipasi

Prinsip dakwah ini menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses dakwah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, penilaian, dan pengembangannya.

c. Prinsip Keterpaduan

Mencerminkan adanya upaya untuk memadukan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, bukan monopoli sekelompok orang dan ahli, atau organisasi.

d. Prinsip Berkelanjutan

Prinsip ini menekankan bahwa dakwah itu harus *sustainable*. Artinya, dakwah harus berkelanjutan yang tidak dibatasi oleh waktu.

e. Prinsip Keserasian

Mengandung makna bahwa program dakwah pengembangan masyarakat harus mempertimbangkan keserasian kebutuhan jasmaniah dan ruhaniah masyarakat.

f. Prinsip Kemampuan Sendiri

Menegaskan bahwa kegiatan dakwah pengembangan masyarakat disusun dan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan sumber-sumber (potensi) yang dimiliki masyarakat. Adapun

keterlibatan pihak lain hanyalah bersifat sementara yang berfungsi sebagai fasilitator dan transformasi nilai keagamaan.<sup>24</sup>

## **B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dan Indikator Pemberdayaan**

### **1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektifitas, dalam arti meningkatkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat saja dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*Empower mint setting*) yaitu:

#### a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling stress management intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya, model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*)

#### b. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran,

---

<sup>24</sup> Moh. Ali Aziz, et. al. (ed.). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, h. 15-88

pengetahuan keterampilan dari sikap-sikap klien, agar memiliki kemampuan memecah permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*larg system strategy*). Karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumus an kebijakan, perencanaan social kampanye, aksi sosial, obbying, pengorganisasian, masyarakat. Managemen konflik adalah beberapa strategi besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasisituasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.<sup>25</sup>

Secara umum, ada 4 strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu meliputi :<sup>26</sup>

a. *The growth strategy*

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, sektor pertanian, pemodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di pedesaan.

b. *The responsive strategy*

---

<sup>25</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama , 2005), hal. 66

<sup>26</sup> Moh. Ali azis,dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma dan Aksi*, (Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2005), hal. 170

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (self need assistance) untuk memperlancar usaha sendiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai dengan kebutuhan proses pembangunan. Tetapi karena pemberdayaan masyarakat (people empowerment) sendiri belum dilakukan, maka

strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistic dan sulit untuk ditransformasikan kepada masyarakat. Satu hal yang perlu diperhatikan kecepatan teknologi seringkali bahkan selalu tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu sendiri, akibatnya teknologi yang dipakai dalam penerapan strategi ini menjadi disfungsional.

c. *The welfare strategy*

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, tetapi karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultural dan budaya mandiri dalam diri masyarakat, maka yang terjadi adalah tingginya sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Karena itulah dalam setiap usaha pengembangan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah persoalan kultur dan budaya masyarakat.

d. *The integrated or holistic strategy*

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena kegagalan ketiga strategi seperti hal di atas, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok ketiga strategi di atas menjadi alternatif terbaik.

Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat. Karena itulah dalam strategi ini terdapat 3 prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Persamaan, keadilan pemerataan dan partisipasi merupakan tujuan yang secara eksplisit harus ada strategi menyeluruh, maka badan publik yang ditugasi untuk melaksanakan harus:
  - a) Memahami dinamika sosial masyarakat sebagai intervensinya.
  - b) Intervensi dilakukan untuk memperoleh kemampuan masyarakat sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Serta untuk mengambil langkah instrumental yang membutuhkan kemampuan aparatur untuk melakukan intervensi sosial.
- 2) Memerlukan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam komitmen maupun dalam gaya dan cara bekerja, maka badan publik yang belum memiliki kemampuan intervensi sosial akan

melakukan pemimpin yang kuat komitmen pribadinya, tercapainya tujuan strategi holistic tersebut, yaitu untuk:

- a) Menentukan arah nilai organisasi, energi dan proses menuju strategi
  - b) Memelihara integritas organisasi yang didukung oleh *“Institutional leadership”*.
- 3) Keterlibatan badan publik dan organisasi sosial secara terpadu, maka memerlukan suatu pedoman untuk memfungsikan supra organisasi yang berfungsi antara lain:
- a) Membangun dan memelihara perspektif menyeluruh
  - b) Melaksanakan rekrutmen dan pengembangan pimpinan kelembagaan.
  - c) Membantu mekanisme control untuk saling mengatur keterkaitan antara organisasi formal dan informal melalui sistem manajemen strategi. Untuk menjaga prinsip tersebut, maka dalam strategi itu diperlukan keterlibatan semua masyarakat yang berkompeten dan bekerja secara profesional sesuai dengan bidang masing-masing.

## **2. Indikator Keberdayaan**

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang mengangkut ekonomi. Kemampuan mengakses masyarakat sejahtera dan kemampuan kultural dan politis. Ketika aspek

tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu kekuasaan di dalam (*Em Power over*) dan kekuasaan dengan (*Power with*).<sup>27</sup>

### C. Model-Model Pemberdayaan

Dalam hal ini menurut Jack Rothman dalam klasiknya mengembangkan tiga model yang berbunga dalam memahami konsep tentang pemberdayaan masyarakat diantaranya:

#### 1. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Adalah proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri, anggota masyarakat dipandang bukan sebagai system klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

#### 2. Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial disini menunjukkan pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk dan lain-lain.

Perencanaan sosial lebih berorientasi pada “tujuan tugas”. System klien perencanaan sosial umumnya adalah keompok- kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi, seperti para

---

<sup>27</sup> Edi Suharto.....,hal. 63

lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu, wanita tuna susila, para perencana sosial dipandang sebagai ahli (expert) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan.

### 3. Aksi sosial

Tujuan dan sasaran aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamentalis dalam kelembagaan kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of dicisi making*) pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah system klien yang sering kali menjadi korban ketidakadilan struktur.

Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber- sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.....*, hal.37

#### **D. Dakwah Pengembangan Masyarakat**

Berdasarkan kajian konsep dasar pengembangan masyarakat yang dilanjutkan dengan merekonstruksi konsep dakwah sebagai bagian dari upaya membangun paradigma baru model dakwah maka dakwah pengembangan masyarakat harus mengikuti beberapa prinsip dasar yaitu:

*Peratama*, orientasi pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat luas. Dakwah tidak dilaksanakan sekadar merumuskan keinginan sebagian masyarakat saja, tetapi direncanakan sebagai usaha membenahi kehidupan sosial bersama masyarakat agar penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan tidak lagi hidup ditengah-tengah mereka. Skala makro yang menjadi sasaran dakwah bukan berarti meninggalkan skala mikro kepentingan individu anggota masyarakat..

*Kedua*, dakwah pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah upaya melakukan *social engineering* (rekayasa sosial) untuk mendapatkan suatu perubahan tatana kehidupan sosial yang lebih baik.

Disamping kedua prinsip dasar tersebut, ada beberapa prinsip yang lain yang harus terpenuhi dalam dakwah pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Prinsip Kebutuhan; Artinya, program dakwah harus didasarkan atas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik materiil dan non materiil.
- b. Prinsip Partisipasi; Prinsip dakwah ini menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses dakwah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, penilaian, dan pengembangannya.

- c. Prinsip Keterpaduan; Mencerminkan adanya upaya untuk memadukan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, bukan monopoli sekelompok orang dan ahli, atau organisasi.
- d. Prinsip Berkelanjutan; Prinsip ini menekankan bahwa dakwah itu harus *sustainable*. Artinya, dakwah harus berkelanjutan yang tidak dibatasi oleh waktu.
- e. Prinsip Keserasian; Mengandung makna bahwa program dakwah pengembangan masyarakat harus mempertimbangkan keserasian kebutuhan jasmaniah dan ruhaniah masyarakat.
- f. Prinsip Kemampuan Sendiri; Menegaskan bahwa kegiatan dakwah pengembangan masyarakat disusun dan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan sumber-sumber (potensi) yang dimiliki masyarakat. Adapun keterlibatan pihak lain hanyalah bersifat sementara yang berfungsi sebagai fasilitator dan transformasi nilai keagamaan.<sup>29</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

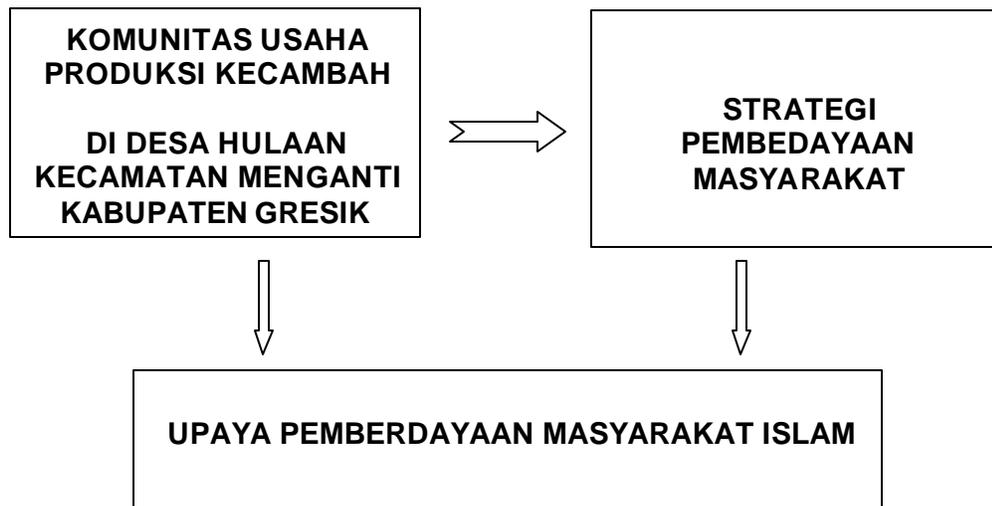
Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus. Proses partisipasi dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok format maupun non format. Untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta usaha mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses, baik proses itu dilakukan secara individu ataupun oleh kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>29</sup> Moh. Ali Aziz, et. al. (ed.). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*..... hal. 15-88

Dari paparan diatas kerangka teoritik dalam penelitian ini adalah berusaha mengkaji tentang komunitas usaha produksi kecambah yang dikaji berdasarkan strategi pemberdayaan masyarakat yang ada di Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Gambar 2.1  
Kerangka Teoritik



Dari kerangka di atas, peneliti berusaha untuk mengkaji bagaimana komunitas usaha produksi kecambah dalam paradigma pemberdayaan masyarakat melalui strategi-strategi yang dipakai oleh komunitas tersebut dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat islam.

Upaya pemberdayaan masyarakat Islam yang dimaksud oleh peneliti adalah bagaimana sebenarnya masyarakat Islam memberdayakan dirinya melalui komunitas usaha produksi kecambah tersebut. Karena mayoritas penduduk yang tinggal di Hulaan tersebut adalah beragama Islam.

Karena pada dasarnya dalam Islam para umatnya juga di anjurkan untuk senantiasa melakukan pemberdayaan dan pengembangan baik dalam



dan meliputi beberapa aspek, termasuk juga didalamnya aspek pengembangan ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas usaha produksi kecambah yang ada di desa hulaan kecamatan menganti kabupaten gresik ini.

Melalui komunitas usaha produksi kecambah tersebut peneliti berusaha untuk mengkaji tentang strategi-strategi pembedayaan yang dilakukan oleh komunitas tersebut khususnya pemberdayaan usaha kecil yang notabene menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah mencari dari berbagai sumber penelitian yang terdahulu, peneliti tidak menemukan begitu banyak terkait dengan masalah pemberdayaan Komunitas. Dari beberapa karya ilmiah yang ada hanya terdapat satu penelitian yang terkait dengan masalah strategi pengembangan masyarakatnya. Yakni skripsi yang ditulis oleh : Moh. Subkhan nim. BO2302032, yang berjudul “Pengembangan Musik Islami Sebagai Strategi Pengembangan Masyarakat Islam Oleh Remaja Musholla AlBarokah Di Lingkungan Jemur Ngawinan Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya 2009. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : Bagaimana pengembangan musik Islami sebagai strategi Pengembangan Masyarakat Islam oleh remaja musholla Barokah di lingkungan Jemur Ngawinan kelurahan Jemurwonosari kecamatan Wonocolo Surabaya.

Adapun karya tulis yang akan disusun oleh penulis dalam skripsi ini adalah tentang “KOMUNITAS USAHA PRODUKSI KECAMBAH”(Dalam

kajian Strategi Pengembangan Masyarakat Usaha Kecil Di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik). Pengembangan Komunitas Usaha Produksi keambah sebagai strategi pengembangan masyarakat Islam inilah yang menjadi pembeda dengan hasil penelitian skripsi yang terdahulu.

Sebagai salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, yang berada di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah. Maka penulis berupaya untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “KOMUNITAS USAHA PRODUKSI KECAMBAH” (Dalam Kajian Strategi Pengembangan Masyarakat Usaha Kecil Di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)”. Hal ini selain sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Strata Satu juga sebagai bukti standarisasi keilmuan penulis selama masa studi di Fakultas Dakwah, dan sebagai media refleksi tentang fenomena penemuan penulis yang ada di lapangan.

Melalui penelitian lapangan ini juga sebagai bukti tanggung jawab dari muatan kurikulum jurusan, khususnya di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah yang lebih menekankan pada keseimbangan teori dan praktek. Dengan konsentrasi studi meliputi antara lain ; “KOMUNITAS USAHA PRODUKSI KECAMBAH” (Dalam Kajian Strategi Pengembangan Masyarakat Usaha Kecil di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik).

Penulis disini beranggapan, bahwa penelitian untuk skripsi tentang Komunitas Produksi Usaha Kecambah notabene rakyat pedesaan yang

tertindas karena gencitan adanya pabrik-pabrik dari kaum kapitalis sangat relevan dengan Jurusan dan Laboratorium di Pengembangan Masyarakat Islam. Untuk kemudian bisa merumuskan ilmu dakwah yang sesuai dengan konteks penelitian ini. Memang penulis menyadari bahwa studi tentang kecambah ini lebih sesuai dikaji untuk Jurusan Pertanian. Akan tetapi, apabila dikaji lebih mendalam lagi.

Penelitian ini lebih relevan di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, karena bagaimanapun juga untuk memahami dan mengkaji masyarakat memang tidak akan bisa melepaskan ilmu-ilmu social Pengembangan Masyarakat Islam. Akan tetapi aspek pengembangan masyarakat terkait dengan aplikasi ilmu-ilmu sosial adalah 'aksi' yang dalam Fakultas Dakwah lebih dikenal dengan "*Dakwah bil hal*". Yang dalam konteks ini lebih ditekankan pada Komunitas Usaha Produksi Kecambah (Dalam Kajian Strategi Pengembangan Masyarakat Usaha Kecil Di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik) yang sedang terhimpit.